



Strategies for Transforming Applied Competency Based Curriculum to Address Graduate Unemployment at State Islamic Religious Universities

Strategi Transformasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan Guna Mengatasi Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Author's Name* : Burhanudin Hartono
 Institution/University : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 Correspondence Author's E-mail : Burhanudinhartono@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 20 th , 2026)	Accepted (June 17 th , 2026)
-----------------	---	--	--

News Article

Keyword:

Applied Curriculum; Open Unemployment; Competency Gap; Education Policy

Abstract

The high rate of open unemployment among university graduates, particularly within State Islamic Religious Universities, represents a crucial challenge for human capital development in Indonesia for the 2021–2025 period. This phenomenon is driven by a significant competency gap between academic curricula, which are dominated by theoretical content, and the actual needs of the business and industrial sectors. This policy paper aims to formulate strategies for addressing unemployment through the transformation of a more responsive and applied curriculum. The analysis is conducted by applying a comprehensive policy evaluation framework, beginning with problem identification using the Urgency, Seriousness, and Growth method to objectively map issue priorities. Subsequently, an assessment of various policy intervention alternatives is performed using William N. Dunn's six evaluation criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and technical feasibility. The results of the analysis indicate that the absence of regulations requiring curriculum partnerships with industry is a primary obstacle in synchronizing graduate competencies. As a strategic solution, this paper recommends the issuance of a Decree of the Minister of Religious Affairs concerning Guidelines for the Development of Applied Competency-Based Curricula. This policy mandates the restructuring of credit loads with a significant portion dedicated to practical work and the integration of digital literacy as a minimum standard for learning outcomes. Through this approach, it is expected that a strong link-and-match synergy will be established between educational institutions and the labor market, thereby sustainably reducing the rate of educated unemployment. The implementation of this policy is an urgent step to ensure that university graduates possess not only a textual religious understanding but also competitive functional agility on both national and international scales.

Kata Kunci:

Kurikulum Terapan;

Abstrak

Tingginya angka pengangguran terbuka lulusan universitas, khususnya pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, menjadi tantangan krusial dalam pembangunan modal manusia di Indonesia

Pengangguran
Terbuka;
Kesenjangan
Kompetensi;
Kebijakan
Pendidikan;

periode 2021–2025. Fenomena ini dipicu oleh adanya kesenjangan kompetensi yang lebar antara kurikulum akademik yang didominasi muatan teoretis dengan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Naskah kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan masalah pengangguran melalui transformasi kurikulum yang lebih responsif dan aplikatif. Analisis dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja evaluasi kebijakan yang komprehensif, dimulai dengan identifikasi masalah menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth untuk memetakan prioritas isu secara objektif. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap berbagai alternatif intervensi kebijakan menggunakan enam kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan teknis. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang mewajibkan kemitraan kurikulum dengan industri merupakan hambatan utama dalam sinkronisasi kompetensi lulusan. Sebagai solusi strategis, naskah ini merekomendasikan penerbitan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan. Kebijakan ini mewajibkan restrukturisasi beban studi dengan porsi praktikum yang signifikan serta integrasi literasi digital sebagai standar minimal capaian pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sinergi link and match yang kuat antara institusi pendidikan dan pasar kerja, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terdidik secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini menjadi langkah mendesak untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki pemahaman tekstual keagamaan, tetapi juga ketangkasan fungsional yang kompetitif dalam skala nasional maupun internasional.

To cite this article: Burhanudin Hartono. (2026). “Strategi Transformasi Kurikulum Berbasis Terapan Guna Mengatasi Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume (issue), Page: 41 – 60.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab sekaligus peluang besar dalam mengelola dinamika Pendidikan Tinggi. Kebutuhan akan Pendidikan Tinggi bukan sekadar formalitas akademik, melainkan pilar strategis untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu jenjang dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran penting. Pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk siap menghadapi tantangan kerja. Kualitas Pendidikan yang baik dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan nantinya. Sebaliknya, rendahnya kualitas Pendidikan dapat berdampak negatif pada Pembangunan di suatu negara.

Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam mencetak modal manusia (*human capital*) yang berkualitas bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memegang peranan ganda yaitu sebagai institusi penjaga moralitas keagamaan sekaligus pencetak tenaga kerja profesional. Namun, dalam satu dekade terakhir, kontradiksi muncul ketika angka pengangguran terbuka justru didominasi oleh lulusan universitas, termasuk lulusan PTKIN. Fenomena ini

bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan indikasi adanya kegagalan struktural dalam sistem kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Fenomena pengangguran terdidik pada lulusan Perguruan Tinggi menjadi isu krusial di tengah upaya Indonesia mengejar bonus demografi. Meskipun jumlah lulusan sarjana keagamaan terus meningkat setiap tahunnya, daya serap pasar kerja terhadap mereka cenderung stagnan atau terkonsentrasi hanya pada sektor-sektor tertentu yang sangat kompetitif, seperti pendidikan dan birokrasi keagamaan. Dalam konteks yang lebih luas, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur pasar tenaga kerja dan kurangnya efisiensi dalam alokasi sumber daya manusia.

Tantangan yang kompleks ini membutuhkan alternatif kebijakan yang strategis dan berkelanjutan. Pengangguran menjadi salah satu masalah utama yang terus menghantui perekonomian suatu negara dan saat ini masih menjadi pekerjaan rumit yang sulit ditangani. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan efek lainnya seperti pada keluarga, masyarakat, hingga stabilitas ekonomi suatu negara.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (per Agustus)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3.61	3.59	2.56	2.32	2.30
SMP	6.45	5.95	4.78	4.11	3.80
SMA umum	9.09	8.57	8.15	7.05	6.88
SMA Kejuruan	11.13	9.42	9.31	9.01	8.63
Diploma I/II/III	5.87	4.59	4.79	4.83	4.31
Universitas (termasuk PTKIN)	5.98	4.80	5.18	5.25	5.39
TPT Nasional	5.95	5.86	5.32	4.91	4.85

Sumber: BPS

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2025 terutama diploma I/II/III sebesar 4,31 % turun 0,52 % dari tahun 2024 sedangkan tingkat universitas (termasuk PTKIN) tahun 2025 sebesar 5,39 % naik 0,14 % dari tahun 2024. TPT universitas di tahun 2024 dan 2025 lebih tinggi dari TPT nasional. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi (Diploma dan Sarjana) menyumbang besar tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berperan penting dalam mengurangi pengangguran dengan meningkatkan produktivitas, keterampilan teknis, dan *soft skills* yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Namun, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki berbagai macam permasalahan.

Masalah pertama terletak pada Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri (*Skills Mismatch*). Fenomena Skills Mismatch atau kesenjangan keterampilan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan tantangan klasik yang semakin krusial di era transformasi digital. Secara sederhana, ini adalah kondisi di mana kompetensi yang dimiliki lulusan tidak sejalan dengan dinamika kebutuhan dunia kerja

(DUDI). Masalah paling mendasar adalah ketidakselarasan antara kurikulum yang diterapkan di PTKIN dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Banyak program studi di PTKIN masih berfokus pada penguasaan teori keagamaan yang mendalam namun minim dalam pembekalan keterampilan praktis (*hard skills*) dan keterampilan adaptif (*soft skills*) yang dibutuhkan di era digital. Hal ini menyebabkan lulusan merasa harus belajar kembali secara mandiri untuk bisa bersaing di pasar pasar kerja (Nofia, 2020).

Kesenjangan kurikulum dan kebutuhan industri merupakan tantangan sistemik di mana materi yang diajarkan di institusi pendidikan tidak lagi sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang dinamis. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh laju perkembangan teknologi dan inovasi industri yang jauh lebih cepat dibandingkan proses pembaruan kurikulum akademik yang cenderung kental dengan birokrasi dan teori konvensional. Akibatnya, banyak lulusan baru memiliki penguasaan teori yang mumpuni namun gagap saat dihadapkan pada implementasi praktis, penggunaan perangkat lunak industri terbaru, atau tuntutan *soft skills* seperti adaptabilitas dan pemecahan masalah kompleks.

Untuk menjembatani jurang ini, diperlukan sinergi yang lebih erat antara akademisi dan praktisi melalui program penyelarasan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi kerja. Tanpa integrasi yang kuat seperti program magang yang relevan, keterlibatan praktisi dalam mengajar, serta pembaruan silabus secara berkala angka pengangguran terdidik akan terus meningkat karena adanya "defisit keterampilan." Industri akan kesulitan mendapatkan talenta siap pakai, sementara lulusan pendidikan formal akan terus terjebak dalam kualifikasi yang relevan secara administratif namun usang secara fungsional di pasar tenaga kerja global.

Masalah muncul ketika ketidakmampuan kurikulum PTKIN dalam merespons kecepatan disrupsi industri 5.0. Sebagian besar program studi di PTKIN masih terjebak pada dikotomi ilmu yang kaku, di mana penguasaan teks keagamaan tidak dibarengi dengan penguasaan alat-alat kerja modern (Ka'anto, 2026). Hal ini menciptakan jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara kualifikasi yang dimiliki lulusan dengan standar kompetensi yang diminta oleh pemberi kerja di sektor swasta maupun publik.

Secara teoritis, menurut *Human Capital Theory*, pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas marjinal seseorang (Becker, 1993). Namun, data menunjukkan bahwa lulusan PTKIN sering kali mengalami "penurunan nilai" di pasar kerja karena kompetensi mereka dianggap tidak relevan. Fenomena *skills mismatch* ini menjadi momok bagi para alumni yang telah menginvestasikan waktu dan biaya, namun tetap terjebak dalam masa tunggu kerja yang panjang, terkadang melebihi 12 bulan setelah wisuda (Ardhana et al., 2025).

Lebih lanjut, kebijakan kurikulum di PTKIN selama ini cenderung bersifat teknosentris pada aspek keagamaan murni. Mata kuliah praktik sering kali dianggap sebagai pelengkap, bukan inti dari pembelajaran. Minimnya jam terbang praktikum menyebabkan mahasiswa tidak memiliki kepercayaan diri saat memasuki lingkungan profesional yang kompetitif (Hanafi, 2014). Inilah yang kemudian memicu tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana keagamaan.

Kurikulum pada PTKIN sering kali masih terjebak dalam dominasi kerangka teoritis yang menitikberatkan pada penguasaan kognitif secara tekstual, namun abai terhadap pengembangan kompetensi aplikatif. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara apa yang dipelajari di ruang kelas dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Rendahnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan tantangan

krusial yang memperlebar jurang antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja (*link and match*). Fenomena ini sering kali disebabkan oleh pola komunikasi yang masih bersifat satu arah, di mana perguruan tinggi cenderung merumuskan capaian pembelajaran secara teoretis-akademis tanpa validasi praktis dari praktisi industri.

Masalah kedua, Inefektivitas Kebijakan *Link and Match* dan Program Pemagangan. Kebijakan *Link and Match*, yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri, seringkali menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya di PTKIN. Salah satu inefektivitas utamanya terletak pada kurangnya relevansi kurikulum yang diajarkan dengan dinamika pasar kerja yang cepat berubah.

Persoalan *link and match* serta efektivitas program pemagangan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memang menjadi diskursus yang kompleks. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mencetak lulusan yang siap kerja (profesional), namun di sisi lain, PTKIN memiliki mandat moral dan keilmuan transendental. Pemerintah telah mendorong kebijakan *link and match*, namun implementasinya di tingkat PTKIN sering kali hanya bersifat administratif atau formalitas (seperti MoU tanpa aksi nyata). Program pemagangan yang ada sering kali tidak memiliki mekanisme evaluasi dampak yang jelas, sehingga peserta magang tidak mendapatkan peningkatan kompetensi yang signifikan atau jaminan keterserapan kerja. Selain itu, cakupan program magang bersertifikat masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah lulusan yang terus meningkat tahunnya (Saweho et al., 2025).

Salah satu penghambat utama terciptanya ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan antara praktisi industri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah minimnya skema insentif yang bersifat win-win solution. Kolaborasi memerlukan waktu dan sumber daya. Namun, saat ini belum ada mekanisme insentif yang jelas baik finansial maupun non-finansial (seperti pengakuan sertifikasi)

Industri melihat kolaborasi dengan PTKIN sebagai beban tambahan karena tidak adanya regulasi yang memberikan keuntungan timbal balik. Hal ini mengakibatkan transfer pengetahuan praktis dari pelaku profesional ke mahasiswa menjadi sangat terbatas, sehingga mahasiswa tidak memiliki gambaran nyata mengenai ekspektasi dunia kerja (Putra et al., 2026).

Selain itu, lemahnya jejaring kemitraan strategis antara PTKIN dengan sektor swasta dan industri manufaktur memperparah kondisi ini, di mana kolaborasi yang terjalin cenderung bersifat jangka pendek dan tanpa evaluasi berkelanjutan. Tanpa adanya sinkronisasi yang mendalam antara teori di ruang kelas dan praktik di lapangan, program pemagangan gagal menjadi jembatan karier yang efektif, yang pada akhirnya justru meningkatkan angka pengangguran terdidik dari kalangan lulusan keagamaan yang kesulitan bersaing di sektor-sektor non-keagamaan.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan intervensi melalui kebijakan Kampus Merdeka. Namun, implementasinya di lingkungan PTKIN sering kali terhambat oleh beban SKS mata kuliah keagamaan yang sangat tinggi, sehingga mahasiswa sulit menemukan ruang untuk mengambil program magang atau studi independen di luar kampus. Fleksibilitas kurikulum yang diamanatkan oleh peraturan belum sepenuhnya terwujud dalam struktur kurikulum PTKIN yang kaku. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka di PTKIN juga masih menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan akademis. Struktur kurikulum yang kaku sering kali sulit untuk dikonversi menjadi kegiatan magang atau studi independen di luar kampus selama satu atau dua semester. Akibatnya, mahasiswa PTKIN kehilangan peluang emas untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung yang seharusnya dapat meningkatkan profil profesional mereka sebelum benar-benar lulus (Kemendikbudristek, 2023).

Masalah Ketiga, mengenai Disparitas antara Struktur Pendidikan dan Permintaan Pasar Kerja merupakan tantangan sistemik yang cukup kompleks. Fenomena ini sering kali berakar pada kebijakan yang lebih mementingkan aspek aksesibilitas pendidikan daripada relevansi lulusan. Kebijakan pembukaan dan penambahan kuota mahasiswa pada program studi tertentu di PTKIN sering kali tidak didasarkan pada analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja (*labour market forecasting*). Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan lulusan (*oversupply*) pada bidang-bidang keagamaan atau sosial, sementara permintaan pasar justru bergeser ke sektor teknologi, digital, dan manufaktur. Akibatnya, lulusan PTKIN mengalami masa tunggu kerja yang lebih panjang dan kerentanan terhadap pengangguran terbuka yang lebih tinggi (Pratiwi, 2025).

Selain itu, terdapat disparitas struktural antara jumlah lulusan pada program studi tertentu dengan permintaan pasar. Banyak PTKIN yang masih mempertahankan kuota besar pada program studi yang pasarnya sudah jenuh, seperti studi agama-agama atau pemikiran Islam, tanpa melakukan diversifikasi ke program studi vokasional yang lebih dibutuhkan. Penumpukan lulusan pada bidang yang sama setiap tahunnya secara otomatis meningkatkan angka pengangguran terdidik.

Dari perspektif sosiologi pendidikan, kegagalan penyerapan tenaga kerja ini menandakan adanya disfungsi dalam sistem struktural-fungsional pendidikan tinggi Islam. Institusi pendidikan seharusnya berfungsi sebagai lembaga seleksi dan alokasi tenaga kerja. Ketika lulusan PTKIN tidak terserap, terjadi ketidakharmonisan antara sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang dapat memicu masalah sosial yang lebih luas, seperti frustrasi sosial di kalangan pemuda terdidik

Disparitas antara struktur kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan tuntutan pasar kerja modern saat ini menjadi tantangan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Secara tradisional, PTKIN memiliki keunggulan komparatif dalam mencetak lulusan yang mahir dalam ilmu-ilmu keagamaan murni (*tafaqquh fiddin*), namun struktur akademisnya sering kali dianggap kurang responsif terhadap linieritas industri yang kini didominasi oleh sektor teknologi digital dan ekonomi kreatif. Kesenjangan ini muncul ketika kompetensi teoretis-normatif yang diajarkan di ruang kelas tidak dibekali dengan kecakapan praktis atau *soft skills* yang spesifik, sehingga menciptakan fenomena mismatch di mana lulusan memiliki kualifikasi tinggi secara moral dan spiritual, tetapi mengalami kendala aksesibilitas saat memasuki bursa kerja profesional yang bersifat sekuler dan teknis.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ditemukan beberapa masalah mendasar yang menjadi tantangan utama dalam penanganan pengangguran lulusan perguruan tinggi. Masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kompleksitas yang mendapat perhatian untuk diselesaikan yaitu

1. Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri (*Skills Mismatch*)

Masalah ini paling mendasar adalah ketidakselarasan antara kurikulum yang diterapkan di PTKIN dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Banyak program studi di PTKIN masih berfokus pada penguasaan teori keagamaan yang mendalam namun minim dalam pembekalan keterampilan praktis (*hard skills*) dan keterampilan adaptif (*soft skills*) yang

dibutuhkan di era digital. Hal ini menyebabkan lulusan merasa harus belajar kembali secara mandiri untuk bisa bersaing di pasar kerja (Nofia, 2020).

2. Inefektivitas Kebijakan *Link and Match* dan Program Pemagangan

Pemerintah telah mendorong kebijakan *link and match*, namun implementasinya di tingkat PTKIN sering kali hanya bersifat administratif atau formalitas (seperti MoU tanpa aksi nyata). Program pemagangan yang ada sering kali tidak memiliki mekanisme evaluasi dampak yang jelas, sehingga peserta magang tidak mendapatkan peningkatan kompetensi yang signifikan atau jaminan keterserapan kerja. Selain itu, cakupan program magang bersertifikat masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah lulusan yang terus meningkat setiap tahunnya (Saweho et al., 2025).

3. Disparitas antara Struktur Pendidikan dan Permintaan Pasar Kerja

Kebijakan pembukaan dan penambahan kuota mahasiswa pada program studi tertentu di PTKIN sering kali tidak didasarkan pada analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja (*labour market forecasting*). Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan lulusan (*oversupply*) pada bidang-bidang keagamaan atau sosial, sementara permintaan pasar justru bergeser ke sektor teknologi, digital, dan manufaktur. Akibatnya, lulusan PTKIN mengalami masa tunggu kerja yang lebih panjang dan kerentanan terhadap pengangguran terbuka yang lebih tinggi (Pratiwi, 2025).

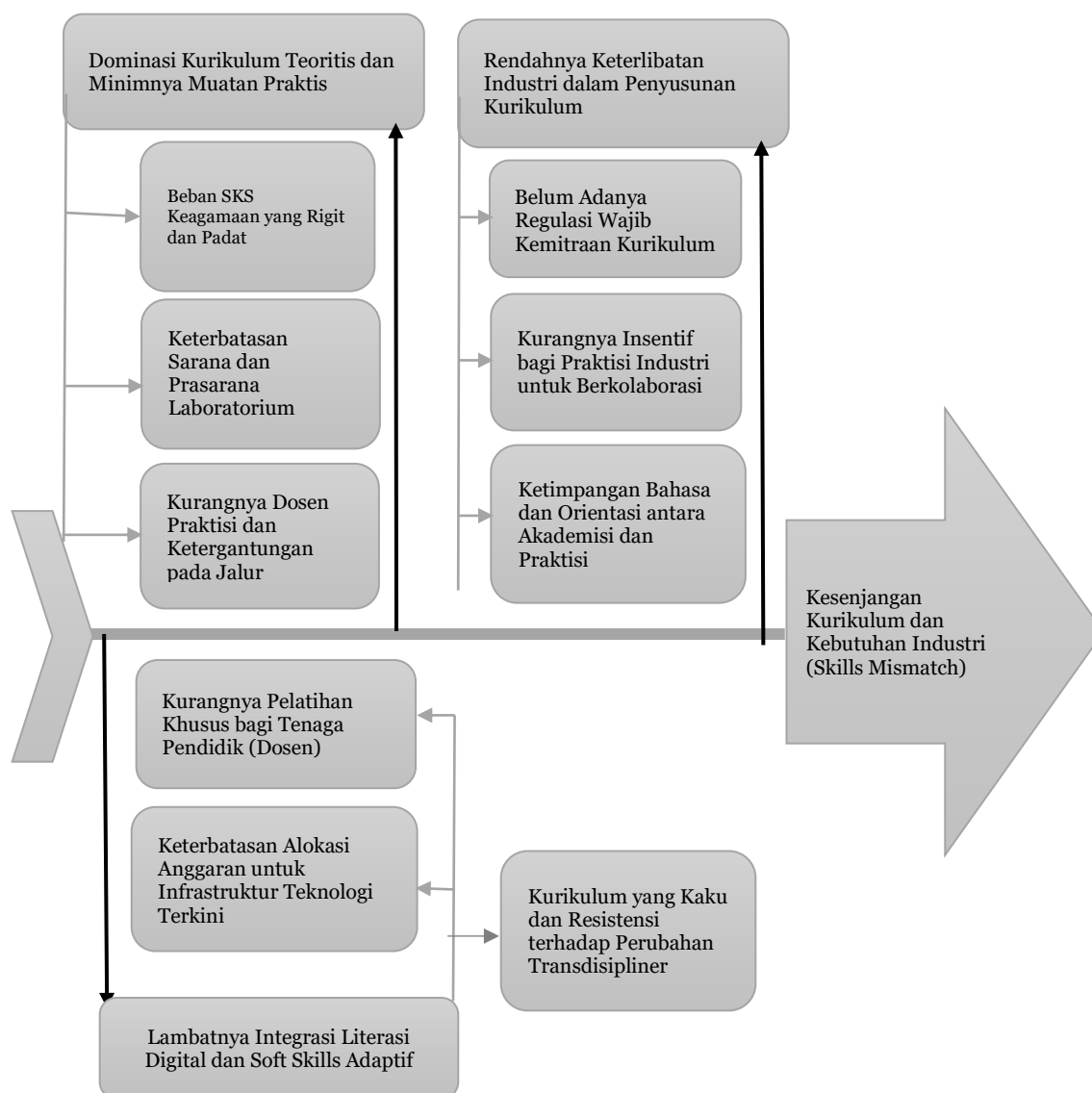
Berdasarkan tiga masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Metode USG adalah metode skoring kualitatif untuk menetapkan urutan prioritas isu atau masalah dengan memberikan nilai skala 1-5, di mana nilai = 1 adalah sangat rendah dan nilai = 5 adalah sangat tinggi. Berikut Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk tiga masalah, dengan skala penilaian 1–5 (5 paling tinggi dan 1 paling rendah).

Tabel 1. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No	Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Skor
1	Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri (<i>Skills Mismatch</i>)	5	5	5	15
2	Inefektivitas Kebijakan <i>Link and Match</i> dan Program Pemagangan	4	4	4	12
3	Disparitas antara Struktur Pendidikan dan Permintaan Pasar Kerja	4	3	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri (*Skills Mismatch*) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri (Skills Mismatch)**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Belum adanya regulasi yang mewajibkan kemitraan strategis antara institusi pendidikan dan sektor industri menyebabkan kurikulum didominasi oleh aspek teoritis dan minim muatan praktis, sehingga menciptakan kesenjangan keterampilan (skills mismatch) yang signifikan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan di atas, maka tujuan kajian adalah:

1. Menganalisis berbagai akar masalah yang menjadi penyebab timbulnya pengangguran lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

2. Menganalisis beberapa alternatif kebijakan di bidang pendidikan untuk mengatasi masalah pengangguran lulusan PTKIN.
3. Menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan untuk mengatasi masalah pengangguran lulusan PTKIN.

Manfaat Kajian

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan implementatif:

1. Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi: Kajian ini menyediakan rekomendasi kebijakan yang konkret dan strategis bagi pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTKIN) untuk merumuskan kebijakan yang tepat
2. Bagi Pemerintah : Hasil kajian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang Pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman.
3. Bagi Akademisi dan Praktisi: Kajian ini dapat berfungsi sebagai studi kasus dan panduan praktis bagi akademisi dan praktisi lain yang tertarik pada isu masalah pengangguran terdidik

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia)

Teori ini dikembangkan oleh Gary Becker yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Dalam konteks PTKIN, jika kurikulum hanya fokus pada teori tanpa keterampilan praktis, maka "nilai pasar" dari modal manusia yang dihasilkan menjadi rendah, sehingga industri enggan menyerap lulusan tersebut (Becker, G. S. 1993).

2. *Theory of Skill Mismatch* (Teori Ketidaksesuaian Keterampilan)

Teori ini menjelaskan fenomena di mana terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Ketidaksesuaian ini bisa bersifat horizontal (bidang studi tidak sesuai jenis pekerjaan) atau vertikal (tingkat pendidikan tidak sesuai kebutuhan posisi), (McGuinness, S., Pouliakas, K., & Redmond, P. 2018).

3. *Triple Helix Model*

Teori ini menekankan pentingnya sinergi antara tiga aktor utama: Universitas (PTKIN), Industri, dan Pemerintah. Kegagalan keterlibatan industri dalam kurikulum PTKIN menunjukkan bahwa hubungan *Triple Helix* tidak berjalan optimal, sehingga inovasi dan relevansi pendidikan tinggi terhambat (Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 2000).

4. *Connectivism Learning Theory* (Teori Belajar Konektivisme)

Diusulkan oleh George Siemens, teori ini sangat relevan dengan kebutuhan literasi digital. Konektivisme berpendapat bahwa di era digital, belajar adalah proses menghubungkan simpul-simpul informasi yang terspesialisasi. Jika PTKIN lambat mengintegrasikan teknologi, mahasiswa kehilangan kemampuan untuk "belajar cara belajar" di ekosistem digital modern (Siemens, G. 2005).

5. *Structural-Functionalism Theory* (Teori Struktural Fungsional)

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, institusi pendidikan berfungsi sebagai alat seleksi dan alokasi tenaga kerja. Jika PTKIN gagal menghasilkan lulusan yang terserap kerja, berarti terjadi disfungsi struktural. Sistem pendidikan tidak lagi menjalankan fungsinya secara harmonis dengan sistem ekonomi (pasar kerja) (Parsons, T. 1959).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Link and Match*

Konsep ini menekankan perlunya keselarasan antara kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di PTKIN, hal ini berarti kurikulum tidak boleh hanya berbasis pada idealisme akademik, tetapi harus responsif terhadap dinamika pasar kerja (Kemendikbudristek, 2024).

2. *21st Century Skills* (Keterampilan Abad ke-21)

Konsep ini mengidentifikasi empat pilar utama (4C): *Critical thinking*, *Creativity*, *Collaboration*, dan *Communication*. Lulusan PTKIN tidak hanya dituntut menguasai teks keagamaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan adaptasi tinggi di tengah perubahan global yang cepat (Partnership for 21st Century Learning, 2019).

3. *Work-Ready Graduates* (Kesiapan Kerja Lulusan)

Konsep ini mengukur sejauh mana seorang lulusan memiliki atribut (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang membuat mereka mampu memberikan kontribusi segera setelah diterima bekerja. Fokusnya adalah pada transisi yang mulus dari bangku kuliah ke lingkungan profesional (Coetzee, M, 2025).

4. *Entrepreneurial University* (Universitas Kewirausahaan)

Konsep ini mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi tidak hanya sebagai pusat pengajaran, tetapi juga sebagai inkubator inovasi. PTKIN didorong untuk mencetak lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri melalui *technopreneurship* berbasis nilai-nilai Islam (Etzkowitz, H, 2013)..

5. *Lifelong Learning* (Pembelajaran Sepanjang Hayat)

Di era disrupsi, pengetahuan cepat usang. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan formal di PTKIN harus membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk terus belajar secara mandiri (*self-directed learning*) agar mereka tetap relevan di pasar kerja masa depan (UNESCO, 2022).

6. *Digital Fluency* (Kefasihan Digital)

Berbeda dengan literasi digital dasar, *digital fluency* adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara strategis untuk memecahkan masalah kompleks. Bagi lulusan PTKIN, ini mencakup kemampuan mengelola konten keagamaan di media digital secara profesional dan etis (Miller, S. M, 2024).

7. *Outcome-Based Education* (OBE)

OBE adalah pendekatan kurikulum yang berfokus pada hasil akhir (apa yang bisa dilakukan mahasiswa setelah lulus) daripada sekadar input (apa yang

diajarkan). Implementasi OBE di PTKIN memaksa setiap mata kuliah untuk memiliki kaitan langsung dengan profil profesional lulusan (Spady, W. G, 1994).

METODOLOGI

Metodologi dalam *policy paper* ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis kebijakan publik untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan dan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021–2025 untuk memetakan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lulusan universitas dan PTKIN. Selanjutnya, identifikasi masalah dilakukan secara mendalam melalui studi literatur dan tinjauan dokumen regulasi yang relevan.

Untuk menentukan prioritas penanganan, menggunakan metode skoring USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan skala likert 1–5 guna menilai tingkat mendesak dan dampak dari setiap permasalahan yang ditemukan. Setelah masalah utama ditetapkan, dilakukan analisis akar penyebab menggunakan diagram *fishbone* untuk melihat keterkaitan antar variabel secara visual.

Pada tahap akhir, penulis merumuskan alternatif kebijakan yang kemudian diuji melalui Analisis Komparatif Kriteria William N. Dunn, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil dari perbandingan matriks skoring ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan rasional untuk merekomendasikan intervensi kebijakan yang paling tepat bagi kementerian terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tren yang mengkhawatirkan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas (termasuk PTKIN). Pada tahun 2025, TPT lulusan universitas tercatat sebesar 5,39%, mengalami kenaikan 0,14% dari tahun sebelumnya. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional yang berada di level 4,85%. Analisis ini menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja terdidik. Temuan ini mengonfirmasi adanya diskoneksi antara pertumbuhan jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Berdasarkan identifikasi menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), masalah kesenjangan kurikulum menempati prioritas tertinggi karena jika tidak segera diintervensi, angka pengangguran lulusan akan terus tumbuh secara eksponensial (Dunn, 2018).

Dalam kerangka Teori Modal Manusia (Human Capital Theory), pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas individu. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa lulusan PTKIN mengalami "penyusutan nilai modal manusia" akibat kurikulum yang terlalu berorientasi pada aspek teoretis-konvensional. Hal ini menyebabkan lulusan tidak memiliki nilai tukar yang kompetitif di pasar kerja modern yang lebih menghargai keterampilan teknis dan fungsional dibandingkan sekadar pemahaman tekstual (Becker, 1993).

Fenomena *skills mismatch* menjadi temuan kunci yang menjelaskan mengapa banyak lulusan PTKIN sulit terserap di sektor industri. Terdapat perbedaan signifikan antara capaian pembelajaran yang dirumuskan institusi dengan kompetensi riil yang

dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ketidaksesuaian ini menciptakan inefisiensi ekonomi, di mana investasi pendidikan yang besar tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang siap pakai (McGuinness et al., 2018).

Analisis melalui Teori Fungsionalisme Struktural menunjukkan bahwa PTKIN belum menjalankan fungsi alokasi sosial secara optimal. Institusi pendidikan seharusnya bertindak sebagai mekanisme seleksi yang menempatkan individu pada peran ekonomi yang tepat. Ketika kurikulum tidak membekali mahasiswa dengan kompetensi terapan, maka fungsi alokasi ini terhambat, sehingga lulusan keagamaan seringkali tersisih dari kompetisi profesional di sektor-sektor strategis nasional (Parsons, 1959).

Selanjutnya, tinjauan Teori Konektivisme mengungkapkan bahwa di era digital, kemampuan untuk terhubung dengan jaringan informasi dan teknologi adalah syarat mutlak bagi lulusan. Kurikulum PTKIN yang ada saat ini masih minim mengintegrasikan literasi digital sebagai standar minimal. Akibatnya, lulusan kehilangan ketangkasan fungsional yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam ekosistem ekonomi digital yang kini mendominasi pasar kerja global (Siemens, 2005).

Penerapan Model Triple Helix dalam pembahasan ini menyoroti lemahnya sinergi antara universitas, industri, dan pemerintah di lingkungan PTKIN. Hubungan tripartit yang ada masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi sinkronisasi kurikulum. Tanpa adanya regulasi yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi, institusi pendidikan akan terus berjalan secara mandiri tanpa panduan kebutuhan pasar yang jelas (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Kebutuhan akan transformasi menuju *Entrepreneurial University* menjadi poin krusial dalam hasil kajian bapak. PTKIN dituntut untuk mulai bergeser dari sekadar institusi pengajaran menjadi pusat inkubasi inovasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pasar kerja 2021-2025 yang menuntut kemandirian ekonomi. Restrukturisasi kebijakan harus diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan agar lulusan memiliki alternatif karier sebagai pencipta lapangan kerja (Etzkowitz, 2013).

Berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn, aspek Efektivitas kebijakan transformasi kurikulum dinilai sangat tinggi untuk memitigasi pengangguran. Penggunaan instrumen hukum berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) dianggap sebagai langkah paling strategis untuk memaksa terjadinya perubahan kurikulum di tingkat program studi. Tanpa intervensi regulasi di tingkat hulu, upaya peningkatan kompetensi di tingkat hilir hanya akan memberikan dampak yang bersifat parsial (Dunn, 2018).

Implementasi Outcome-Based Education (OBE) diidentifikasi sebagai solusi teknis yang paling relevan. OBE menekankan pada hasil belajar yang terukur dan dapat didemonstrasikan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, PTKIN dapat memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki korelasi langsung dengan keterampilan terapan yang dibutuhkan industri, sehingga mengurangi risiko pengangguran akibat ketidakmampuan praktis lulusan (Spady, 1994).

Aspek Responsivitas dalam kriteria Dunn menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum terapan sangat sesuai dengan kebutuhan kelompok target, yaitu mahasiswa yang menginginkan kepastian kerja. Integrasi sertifikasi profesi ke dalam kurikulum menjadi bentuk nyata dari responsivitas tersebut. Sertifikasi ini memberikan sinyal positif bagi pemberi kerja mengenai kualitas dan kesiapan kerja lulusan PTKIN di tengah persaingan yang semakin ketat (Dunn, 2018).

Secara Kelayakan Teknis, penerbitan kebijakan melalui Kementerian Agama memiliki otoritas penuh untuk menyeragamkan standar kompetensi di seluruh PTKIN. Hal ini lebih efisien dibandingkan melakukan program pelatihan ulang (*retraining*) masif bagi

lulusan yang sudah terlanjur menganggur. Transformasi di tingkat kurikulum dipandang sebagai investasi jangka panjang yang paling rasional untuk memperbaiki kualitas output pendidikan tinggi Islam di Indonesia (Winarno, 2014).

Sebagai rangkuman hasil dan pembahasan, mitigasi pengangguran lulusan PTKIN hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi antara regulasi pemerintah, kebutuhan industri, dan inovasi kurikulum universitas. Transformasi kurikulum berbasis kompetensi terapan melalui regulasi KMA adalah langkah mendesak untuk memastikan lulusan tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga kompetitif secara profesional dalam pembangunan modal manusia nasional periode 2021-2025 (Winarno, 2014).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini merupakan payung hukum tertinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan pasar kerja. Pasal 35 secara spesifik menyebutkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu.

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

PP ini mengatur mengenai otonomi perguruan tinggi dalam menggali kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ini memberikan legalitas bagi PTKIN untuk membentuk *Career Development Center* (CDC) dan unit kewirausahaan guna menekan angka pengangguran.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Peraturan ini memaksa PTKIN untuk menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang setara dengan standar kompetensi kerja nasional maupun internasional.

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 38 Tahun 2017 tentang Statuta PTKIN

PMA ini memberikan kewenangan kepada masing-masing PTKIN untuk mengelola kurikulum dan melakukan kerja sama dengan pihak eksternal. Peraturan ini menjadi dasar bagi kampus untuk membuka program studi baru atau merevitalisasi program studi lama agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi kampus (termasuk PTKIN) untuk merancang kurikulum yang tidak lagi terpaku pada beban SKS kelas yang kaku. Peraturan ini mendukung konsep "Kampus Merdeka" di mana mahasiswa dapat belajar di luar prodi (magang, proyek desa, wirausaha) hingga 2 semester untuk meningkatkan *employability*.

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab

Meskipun sering diasosiasikan dengan sekolah/madrasah, KMA ini menjadi acuan filosofis dalam integrasi keilmuan di PTKIN. Dukungan peraturan ini penting untuk memastikan bahwa meski kurikulum bermuatan praktis, nilai-nilai moderasi beragama dan identitas PTKIN tetap terjaga (integrasi ilmu).

Limitasi Kajian

Kajian dalam *policy paper* ini dibatasi pada analisis strategi pengurangan angka pengangguran lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama dengan fokus pengamatan pada periode 2021 hingga 2025. Analisis difokuskan secara mendalam pada permasalahan kesenjangan kurikulum (skills mismatch) dan kelemahan regulasi kemitraan industri, sehingga tidak mencakup faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi global, kebijakan rekrutmen spesifik di sektor swasta, maupun karakteristik psikologis personal lulusan. Penilaian alternatif kebijakan pun dibatasi pada penggunaan metode USG dan kriteria William N. Dunn untuk merumuskan rekomendasi strategis berupa Keputusan Menteri Agama (KMA), tanpa membahas detail teknis implementasi operasional di tingkat program studi secara individual.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan tinggi Islam melalui formulasi strategi yang berbasis bukti (evidence-based policy) untuk menekan angka pengangguran terdidik pada periode 2021–2025. Secara teoritis, artikel ini memperkaya literatur mengenai integrasi konsep *Human Capital* dan *Triple Helix* dalam ekosistem PTKIN yang memiliki karakteristik beban kurikulum ganda.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran lulusan PTKIN melalui intervensi regulasi di tingkat Kementerian Agama, berikut adalah 3 alternatif kebijakan yang dapat dirumuskan:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan di Lingkungan PTKIN dengan substansi:
 - a. Mewajibkan alokasi minimal 40% SKS dalam bentuk praktikum, laboratorium, atau proyek lapangan.
 - b. Mandat bagi setiap program studi (termasuk prodi keagamaan murni) untuk mengintegrasikan mata kuliah "Literasi Data dan Teknologi Digital" sebagai mata kuliah wajib universitas.
 - c. Standardisasi metode asesmen yang tidak hanya berbasis ujian tulis, tetapi berbasis portofolio karya.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Tata Cara Kerja Sama dan Kemitraan Strategis PTKIN dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan substansi Kebijakan:
 - a. Mewajibkan setiap Program Studi memiliki *Advisory Board* (Dewan Penasihat) dari unsur praktisi industri dalam proses peninjauan kurikulum setiap 2 tahun.

- b. Pemberian insentif bagi PTKIN yang berhasil mencapai target serapan lulusan di atas 70% dalam satu tahun pertama setelah wisuda.
 - c. Pengaturan skema *Guest Lecturer* (Dosen Tamu) dari kalangan profesional yang dihitung dalam beban kerja dosen (BKD) secara formal.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Standar Nasional Pengelolaan *Career Development Center* (CDC) dan *Inkubator Bisnis* pada PTKIN dengan Substansi Kebijakan:
 - a. Mewajibkan setiap PTKIN memiliki unit CDC yang terakreditasi dan memiliki anggaran mandiri untuk pelatihan *soft skills* (kepemimpinan, negosiasi, manajemen waktu).
 - b. Mewajibkan integrasi sistem *Tracer Study* yang terhubung langsung dengan *database* Kemenaker untuk memantau status ke bekerjaan alumni secara *real-time*.
 - c. Penyediaan dana hibah kompetisi modal usaha bagi mahasiswa yang melalui jalur *entrepreneurship* sebagai pengganti skripsi (konversi tugas akhir).

Analisis Komparatif Alternatif Kebijakan (Kriteria William N. Dunn)

Analisis komparatif alternatif kebijakan menurut William N. Dunn adalah prosedur sintesis informasi untuk membandingkan berbagai pilihan kebijakan guna merekomendasikan tindakan terbaik. William N. Dunn menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan. Pendekatan ini memfasilitasi pengambilan keputusan publik yang rasional.

Tabel 2. Analisis Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Kriteria Evaluasi	KMA Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan	PMA Tata Cara Kerja Sama dan Kemitraan Strategis PTKIN dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	KMA Standar Nasional Pengelolaan Career Development Center (CDC) dan Inkubator Bisnis
Efektivitas	5	4	3
Efisiensi	3	5	4
Kecukupan	5	3	3
Keadilan	4	3	4
Responsivitas	5	5	5
Kelayakan	5	4	4
Total Score	27	24	23

Berikut adalah skoring terhadap 3 alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya (Regulasi Transformasi Kurikulum, Regulasi Kemitraan DUDI, dan Regulasi Revitalisasi CDC) untuk mengatasi pengangguran lulusan PTKIN.

Hasil analisis Berdasarkan Kriteria Dunn:

1. KMA Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan (Skor: 27)

- Efektivitas (5): transformasi ini sangat efektif, bergeser dari fokus *input* (apa yang diajarkan) menuju fokus *outcome* (apa yang bisa dilakukan siswa).
 - Efisiensi (3): Membutuhkan biaya besar untuk pelatihan ulang ribuan dosen dan perubahan dokumen kurikulum secara nasional, namun hasilnya sangat berdampak panjang.
 - Kecukupan (5): Merupakan solusi fundamental. Dengan mengubah kurikulum di "hulu", kompetensi lulusan secara otomatis meningkat secara massal. Ini adalah cara paling cukup (*adequate*) untuk menghilangkan akar *skills mismatch*
 - Keadilan (4): dipandang sebagai langkah menuju keadilan dalam dunia pendidikan karena ia berupaya memecahkan kekakuan sistem lama yang seringkali "menyamartakan" kemampuan mahasiswa.
 - Responsivitas (5): dapat dinilai memiliki tingkat responsivitas yang sangat tinggi karena desainnya yang adaptif dan berorientasi pada hasil nyata bagi pemangku kepentingan.
 - Kelayakan (5): kelayakan atau nilai guna yang sangat tinggi karena ia berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dengan realitas zaman yang terus berubah. Kurikulum bukanlah dokumen statis, melainkan instrumen dinamis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan
2. PMA Tata Cara Kerja Sama dan Kemitraan Strategis PTKIN dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Skor: 24)
- Efektivitas (4): dinilai tinggi karena kebijakan ini menyentuh akar persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan.
 - Efisiensi (5): Sangat efisien karena secara regulasi tidak membutuhkan biaya tinggi. Kementerian hanya perlu menerbitkan payung hukum yang kuat bagi PTKIN untuk bekerja sama dengan perusahaan.
 - Kecukupan (3): dinilai memiliki tingkat kecukupan (*adequacy*) yang cukup baik dalam memecahkan masalah kesenjangan keterampilan (*skill gap*).
 - Keadilan (3): Berpotensi menimbulkan kesenjangan antar kampus. PTKIN di kota besar akan lebih mudah bermitra dengan industri dibanding PTKIN di daerah terpencil.
 - Responsivitas (5): dapat dinilai memiliki tingkat responsivitas yang sangat tinggi dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam mengatasi masalah pengangguran terdidik dan kesenjangan kompetensi.
 - Kelayakan (4): terutama dalam konteks pendidikan vokasi dan pengembangan ekonomi, dinilai layak dan krusial karena beberapa alasan fundamental yang menyangkut efisiensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
3. KMA Standar Nasional Pengelolaan Career Development Center (CDC) dan Inkubator Bisnis (Skor: 23)
- Efektivitas (3): Meskipun membantu, CDC hanya bersifat "penyambung". Jika kualitas dasar lulusan dari kurikulum sudah rendah, CDC akan kesulitan memasarkan mereka ke perusahaan besar.

- Efisiensi (4): menjadi langkah yang efisien dalam ekosistem pendidikan tinggi dan kewirausahaan karena ia berfungsi sebagai jembatan (bridge) yang memangkas kesenjangan antara teori akademik dan realitas industri.
- Kecukupan (3): dinilai memiliki tingkat kecukupan (*adequacy*) yang cukup baik dalam memecahkan masalah kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
- Keadilan (4): dianggap sebagai langkah yang adil dalam memecahkan masalah karena pendekatannya yang bersifat sistemik dan inklusif.
- Responsiveness (5): Sangat responsif terhadap keluhan lulusan baru yang bingung mencari kerja. Memberikan bantuan langsung berupa pelatihan *soft skills* dan bursa kerja.
- Kelayakan (4): dinilai layak karena bukan sekadar renovasi fisik, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan institusi tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan menggunakan teori William N. Dunn, dapat disimpulkan **Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan** merupakan langkah pertama untuk diambil oleh Kementerian Agama. Meskipun memiliki tantangan efisiensi (biaya dan waktu), alternatif ini memiliki nilai Efektivitas dan Kecukupan (*Adequacy*) tertinggi dalam menyelesaikan masalah pengangguran secara struktural di lingkungan PTKIN.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan tingginya angka pengangguran lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan konsekuensi langsung dari skills mismatch yang bersifat sistemik. Kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum yang terlalu berorientasi pada aspek teoretis-konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan pasar kerja modern yang menuntut ketangkasan fungsional dan literasi digital. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat antara capaian pembelajaran akademik dengan standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, lulusan PTKIN akan terus menghadapi hambatan besar dalam proses transisi menuju penyerapan tenaga kerja yang produktif.

Melalui evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn, ditemukan bahwa intervensi pada tingkat regulasi kurikulum (hulu) merupakan solusi yang paling efektif, efisien, dan memiliki kelayakan teknis tertinggi dibandingkan intervensi di tingkat hilir. Penetapan standar nasional melalui Keputusan Menteri Agama mengenai kurikulum berbasis kompetensi terapan dinilai sebagai langkah strategis yang mampu memaksa terjadinya restrukturisasi beban studi secara masif. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah dokumen akademik, tetapi juga untuk mengintegrasikan pengalaman praktis dan sertifikasi kompetensi sebagai bagian integral dari proses pendidikan di lingkungan PTKIN.

Sebagai penutup, keberhasilan mitigasi pengangguran terdidik ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan yang mewajibkan kemitraan strategis dengan industri. Sinergi link and match yang diciptakan melalui transformasi kurikulum terapan diharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki profil ganda: mumpuni dalam nilai-nilai keagamaan sekaligus kompetitif secara profesional. Implementasi kebijakan ini secara konsisten akan memastikan bahwa

PTKIN berkontribusi positif terhadap pembangunan modal manusia nasional dan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama perlu menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang secara spesifik mengatur pedoman Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Terapan di Lingkungan PTKIN untuk mendorong Pimpinan PTKIN untuk beralih dari kurikulum yang bersifat tekstual teoritis menuju kurikulum yang adaptif dengan dunia usaha agar lulusan PTKIN memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dinamis pasar kerja modern.

REFERENSI

- Ardhana, et al. (2025). Analisis ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Indonesia. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(4). <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i4.156>
- Arna, A. A., & Rosana, E. P. (2022). Shaping curriculum in State Islamic Religious Universities (PTKIN) to match the job market. *Muslim Education Review*, 1(1), 178–197. https://www.researchgate.net/publication/370576678_Shaping_Curriculum_in_State_Islamic_Religious_Universities_PTKIN_to_Match_the_Job_Market
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan*. <https://www.bps.go.id/id>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Coetzee, M. (2025). *Work readiness in the fourth industrial revolution: Trends and transitions*. Springer Nature.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. *Higher Education Management and Policy*, 24(3), 17–35. <https://doi.org/10.1787/hemp-24-5k3wd38qr79f>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Hanafi, M. (2014). Pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam. *Islamuna*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.572>
- Ka’anto. (2026). Transformasi dan resistensi: Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0 (Sebuah tinjauan sistematis). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5012>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023*

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan implementasi kebijakan link and match di perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan evaluasi dampak pelaksanaan MBKM nasional*. Kemendikbudristek.
- McGuinness, S., Pouliakas, K., & Redmond, P. (2018). How useful is the concept of skills mismatch? *World Development*, 103, 155–170. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.004>
- Miller, S. M. (2024). *Digital fluency: Understanding the skills for the modern workplace*. Academic Press.
- Nofia. (2020). Analisis tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Islam Negeri. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.3328>
- Parsons, T. (1959). The school class as a social system: Some of its functions in American society. *Harvard Educational Review*, 29(4), 297–318.
- Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st century learning definitions*. Battelle for Kids. <https://www.battelleforkids.org/networks/p21>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Sekretariat Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2012a). *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Pratiwi, R. A. (2025). Pengangguran lulusan pendidikan tinggi di Indonesia: Dinamika pertumbuhan dan ketidaksesuaian pasar kerja (2019–2025). *Journal of Economic and Social Policy*, 7(2), 85–98. <https://doi.org/10.63892/aletheia.2.2025.85-94>
- Putra, et al. (2026). Kolaborasi dan inovasi: Strategi menuju ekosistem industri halal berdaya saing global. *Ika Bina En Pabojo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.36987/ikabinaenpabolo.v6i1.8475>
- Saweho, et al. (2025). Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB): Efektivitas dalam meningkatkan kapabilitas mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6509>
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
- Spady, W. G. (1994). *Outcome-Based Education: Critical issues and answers*. American Association of School Administrators.

UNESCO. (2022). *Making lifelong learning a reality: A handbook*. UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Center of Academic Publishing Service.

Undang Undang Republik Indonesia. (2012b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Negara.